



**PENJAMINAN &
INFRASTRUKTUR**
Guarantee & Infrastructure



GREAT GUARANTEE
for **ECONOMIC GROWTH**
Supporting Sustainable Development Goal

COMPANY PROFILE



guarantee
for **growth**



DAFTAR ISI

CONTENTS

	01	SEKILAS TENTANG PENJAMINAN PT PII (Persero) <i>Guarantee Overview</i>
KERANGKA REGULASI <i>Regulatory Framework</i>	02	
	03	VISI, MISI DAN TUJUAN <i>Vission, Mission and Purpose</i>
MANFAAT PENJAMINAN <i>Benefit of Guarantee</i>	05	
	07	19 SEKTOR YANG DAPAT DIBERIKAN PENJAMINAN <i>Sectors Eligible for Guarantee</i>
SKEMA DAN NILAI TAMBAH PENJAMINAN PROYEK KPBU <i>PPP Project Guarantee Scheme and Added Value</i>	08	
	09	PROSES PENYIAPAN DAN TRANSAKSI PROYEK KPBU <i>PPP Project Preparation and Transaction Process</i>
MANDAT DAN PERAN PT PII DALAM PENGEMBANGAN PROYEK INFRASTRUKTUR <i>Mandate and Role of PT PII Infrastructure Project Development</i>	10	
	11	PENJAMINAN NON-KPBU <i>Credit Guarantee</i>





SEKILAS TENTANG PENJAMINAN PT PII (Persero)

GUARANTEE OVERVIEW

Meningkatnya kebutuhan pembangunan infrastruktur nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah keterbatasan anggaran Pemerintah, mendorong partisipasi swasta dalam pengembangan infrastruktur nasional melalui dukungan kebijakan, instrumen dan kerangka fiskal pemerintah.

Sebagai bentuk dukungan tersebut, pada tanggal 30 Desember 2009 Pemerintah Indonesia telah membentuk PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PT PII, sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibawah Kementerian Keuangan yang bertugas untuk memberikan penjaminan atas proyek infrastruktur pemerintah yang dikembangkan dengan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).

Penjaminan PT PII dimaksudkan untuk menjamin risiko politik dari pemerintah baik pusat dan daerah selaku penanggung jawab proyek kerjasama untuk memberikan kepastian dan kenyamanan bagi investor dalam berinvestasi. Keberadaan penjaminan PT PII dapat meningkatkan kepastian partisipasi dan pembiayaan swasta bagi pembangunan infrastruktur Indonesia.

PT PII juga bekerjasama dengan lembaga multilateral internasional untuk meningkatkan kapasitas penjaminan untuk menjamin proyek-proyek infrastruktur nasional berskala besar.

The increasing demand for infrastructure development to support Indonesia's economic growth in the midst of budget has led the Government of Indonesia to provide fiscal support and a better framework in attracting private investment and participation of a measurable scale. On December 30, 2009 the Government of Indonesia has established Indonesia Infrastructure Guarantee Fund or IIGF, as a State-Owned Enterprises (SOEs) under the Ministry of Finance which is responsible on providing government guarantees for infrastructure projects developed under the Public Private Partnership (PPP) scheme

IIGF guarantee is intended to guarantee political risk of both central and local government as a Contracting Agency to provide certainty and comfort for investors. The availability of IIGF guarantee can increase the certainty of private sector's participation and financing for infrastructure development in Indonesia.

IIGF also works with international and multilateral institutions in increasing its capacity to guarantee large scale infrastructure projects.

KERANGKA REGULASI

REGULATORY FRAMEWORK

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010

tentang Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur.

concerning Infrastructure Guarantee in Government Cooperation Projects with Business Entities Conducted Through the Infrastructure Guarantee Business Entity.

Peraturan Menteri Keuangan No.95 Tahun 2017

tentang Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah di Bidang Infrastruktur oleh Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur.

concerning the Scope and Procedure for Giving Government Guarantee in the Infrastructure Sector by the Infrastructure Guarantee Agency.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 Tahun 2016

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha.

concerning Amendments to the Regulation of the Minister of Finance Number 260 of 2010 concerning Implementation Guidelines for Infrastructure Guarantee in Projects of Government and Business Entity Cooperation.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2016

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur.

concerning Amendments to Government Regulation Number 35 of 2009 concerning the State Capital Participation of the Republic of Indonesia for the Establishment of a Company in the Field of Infrastructure Guarantee.

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015

tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

concerning Cooperation between the Government and Business Entities in the Provision of Infrastructure.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73 Tahun 2018

tentang Fasilitas Untuk Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

concerning Facilities for the Preparation and Implementation of Transactions of Government Cooperation Projects with Business Entities in the Provision of Infrastructure.



VISI, MISI DAN TUJUAN

VISION, MISSION AND PURPOSE



VISI VISION

Menjadi BUMN penggerak utama yang aktif dalam mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Become the leading SOE in accelerating infrastructure sustainable development to improving the quality of life in Indonesian society.



MISI MISSION

Memastikan percepatan pemenuhan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memberikan penjaminan dan nilai tambah bagi pembangunan infrastruktur yang:

- 1) Memiliki dampak kemanfaatan yang paling besar kepada masyarakat Indonesia.
- 2) Melindungi kepentingan Pemerintah dalam pemenuhan pembangunan infrastruktur melalui proses yang transparan dan akuntabel.
- 3) Meningkatkan kepercayaan dari pihak investor dengan memberikan kenyamanan berinvestasi dan kepastian pembayaran atas klaim risiko kerugian

Ensure accelerated fulfillment of sustainable infrastructure development by providing assurance and added value for infrastructure development that:

- 1) *Has the greatest impact of benefit to the people of Indonesia.*
- 2) *Protecting the interests of the Government in the fulfillment of infrastructure development through a transparent and accountable process.*
- 3) *Increase investor's trust by providing investment comfort and certainty of payment on claim of loss risk of a cooperative infrastructure project in cooperation.*



TUJUAN OBJECTIVE

Menjadi BUMN penggerak utama yang aktif dalam mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Dan memastikan percepatan pemenuhan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan Memberikan penjaminan dan nilai tambah bagi pembangunan infrastruktur yang memiliki dampak kemanfaatan yang paling besar kepada masyarakat Indonesia, melindungi kepentingan Pemerintah dalam pemenuhan pembangunan infrastruktur melalui proses yang transparan dan akuntabel dan meningkatkan kepercayaan dari pihak investor dengan memberikan kenyamanan berinvestasi dan kepastian pembayaran atas klaim risiko kerugian suatu proyek infrastruktur yang dikerjasamakan.

Become the leading SOE in accelerating infrastructure sustainable development to improving the quality of life in Indonesian society. Ensuring accelerated fulfillment of sustainable infrastructure development by providing guarantees and added value for infrastructure development that has the greatest impact on the benefit of the people of Indonesia, protecting the interests of the Government in fulfilling infrastructure development through a transparent and accountable process and increasing investor confidence by providing investment convenience and certainty of payment for the claim of risk of loss of an infrastructure project that is cooperated.



MANFAAT PENJAMINAN

BENEFIT OF GUARANTEE

Penjaminan yang diberikan PT PII (Persero) diharapkan dapat memberi manfaat bagi :

INDONESIA

- Mendukung pembangunan ekonomi melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk proyek infrastruktur berkualitas.
- Mengurangi biaya infrastruktur dengan beban bunga pinjaman yang lebih rendah, sehingga dapat menekan tarif yang dibayarkan masyarakat
- Melindungi Pemerintah dari klaim yang tak terduga dan risiko terhadap kewajiban *financial* proyek infrastruktur yang timbul akibat penjaminan yang diberikan.
- Mendorong atau menstimulasi langkah Pemerintah selanjutnya dalam implementasi KPBU.

PENANGGUNG JAWAB PROYEK KERJASAMA (PJPK)

- Menarik minat swasta dan lembaga keuangan untuk berpartisipasi dalam proyek KPBU, sehingga tingkat keberhasilan pelaksanaan proyek menjadi lebih tinggi dan sesuai jadwal
- Meningkatkan kompetisi dalam proses tender untuk mendapatkan penawaran berkualitas dan harga yang kompetitif

IIGF's guarantees and their subsequent effects will help :

INDONESIA

- *Support economic development through PPP's that provide quality infrastructure projects.*
- *Reduce infrastructure cost through lower interest rate, thus reducing the tariff borne by end users.*
- *Protect the government from unexpected claims and risk exposures to infrastructure-financing liability arising from guarantees.*
- *Encourage/stimulate further government action on PPP's.*

CONTRACTING AGENCY (CA)

- *Attract private investors and financial institutions to participate in PPP projects, hence it can increase the success rate of the project execution in accordance with the plan and schedule.*
- *Bring more competition into the tender process, hence improving the quality of tender proposal and get more competitive price.*

SEKTOR SWASTA

- Mengurangi atau mitigasi risiko yang sulit ditangani oleh sektor swasta.
- Meningkatkan transportasi, kejelasan dan kepastian dalam proses penyediaan penjaminan.
- Meningkatkan *bankability* proyek.
- Memperpanjang jangka waktu pinjaman, yang dapat berpengaruh pada penawaran harga yang lebih kompetitif.
- Mendorong PJKP untuk membuat kontrak sesuai praktek terbaik yang berlaku umum, dan memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian kerjasama.

KRITERIA UMUM PENJAMINAN

Proyek infrastruktur yang dapat diberikan penjaminan oleh PT PII adalah proyek yang menggunakan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) yang sesuai dengan Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Proyek tersebut harus diantaranya memenuhi kelayakan teknis dan keuangan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sektor terkait.

PRIVATE SECTOR

- *Mitigate risk that are difficult for private sector to cover through other means.*
- *Improve transparency, clarity, and certainty of guarantee provision process.*
- *Improve project bankability*
- *Lengthen financing maturities, hence it can improve competitiveness of bid price.*
- *Drive CA's to prepare contract that comply with best practices commonly applied and fulfill obligations under cooperation agreement.*

ELIGIBILITY CRITERIA

Infrastructure project that can be guaranteed by IIGF must be a Public Private Partnership project which comply with Presidential Regulation No. 38 Year 2015 concerning Cooperation Between Government And Business Entities In infrastructure provision.

The project must, among others, be technically and financially feasible, and be in compliance with law and regulations related to their respective sectors.



PROSES PENYIAPAN DAN TRANSAKSI PROYEK KPBU

PPP PROJECT PREPARATION AND TRANSACTION PROCESS

PROSES PENYIAPAN

- a. Melakukan koordinasi dengan PJKP terkait kebutuhan pendampingan
- b. Melakukan review dan finalisasi Perjanjian Penugasan Fasilitas PDF dengan Kementerian Keuangan
- c. Melakukan review dan finalisasi Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas PDF dengan PJKP
- d. Melakukan koordinasi terkait pengadaan konsultan
- e. Melakukan penyusunan Kajian Akhir Prastudi Kelayakan (FBC)
- f. Melakukan penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
- g. Melakukan penyusunan dokumen pendukung pelaksanaan proyek
- h. Melakukan penyusunan rancangan dokumen pengadaan
- i. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait penggantian biaya

PROSES TRANSAKSI

- a. Melakukan pendampingan pelaksanaan evaluasi prakualifikasi dan pelaksanaan lelang.
- b. Melakukan pendampingan PJKP sehubungan dengan upaya mendapatkan penjaminan infrastruktur
- c. Melakukan pendampingan PJKP sehubungan dengan upaya mendapatkan Dukungan Pemerintah dan Dukungan Kelayakan proyek
- d. Melakukan pendampingan PJKP dalam penandatanganan Perjanjian KPBU
- e. Melakukan pendampingan PJKP dalam penandatanganan Perjanjian Regres
- f. Melakukan pendampingan PJKP dalam Perolehan Pembiayaan (*Financial Close*)
- g. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait penggantian biaya.

PREPARATION PROCESS

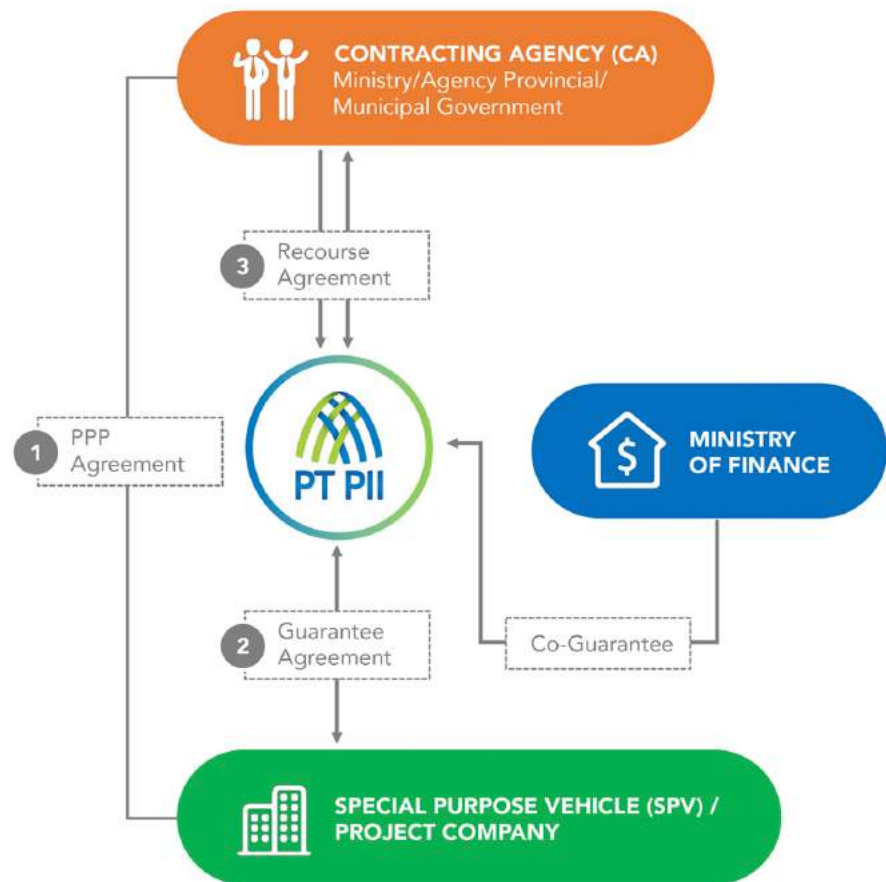
- a. Coordinating with Contracting Agency (CA) related to assistance needs
- b. Review and finalize PDF Facility Assignment Agreement with the Ministry of Finance
- c. Review and finalize Facility Implementation Agreement PDF with Contracting Agency
- d. Coordinating related procurement consultant
- e. Preparing for the Final Study Pre-feasibility Study (FBC)
- f. Preparing document for Environment Impact Analysis
- g. Preparing document for supporting project implementation
- h. Preparing for draft procurement documents
- i. Coordinating with Ministry of Finance related reimbursement

TRANSACTION PROCESS

- a. Conduct implementation assistance prequalification evaluation and implementation auction
- b. Providing assistance to Contracting Agency (CA) in connection with efforts get infrastructure guarantee
- c. Providing assistance to Contracting Agency (CA) in connection with efforts get Support Government and Project Feasibility Support
- d. Conducting assistance within the CA signing of the PPP Agreement
- e. Conducting assistance within the CA signing of the Regres Agreement
- f. Conducting assistance within the CA Funding Acquisition (*Financial Close*)
- g. Coordinating with Ministry of Finance related reimbursement

SKEMA DAN NILAI TAMBAH PENJAMINAN PROYEK KPBU

PPP PROJECT GUARANTEE SCHEME AND ADDED VALUE



PENJAMINAN NON-KPBU

CREDIT GUARANTEE



RUANG LINGKUP

Proyek infrastruktur yang dapat diberikan penjaminan untuk bisa menjalankan fungsinya secara efektif, dibutuhkan adanya payung regulasi berupa PMK Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah di Bidang Infrastruktur oleh BUPI terhadap Risiko Gagal Bayar dari BUMN yang melakukan Pinjaman dan/atau Penerbitan Obligasi.

SCOPE

Infrastructure projects that can be given guarantees To be able to carry out their functions effectively, a regulatory umbrella is needed in the form of Minister of Finance Regulation Procedures for Giving and Implementing Government Guarantees in Infrastructure by BUPI on Risks of Failure to Pay from SOEs that make Loans and / or Issuance of Bonds.



Infrastruktur / Infrastructure

Peraturan Presiden No.82/Tahun 2015

Peraturan Menteri Keuangan No.189/Tahun 2015

Pinjaman Langsung BUMN dari LKI (*Direct Lending*)
Direct SOE Loans from LKI (Direct Lending)



Kelistrikan / Electricity

Peraturan Presiden No.14/Tahun 2017

Peraturan Menteri Keuangan No.130/Tahun 2016

Jaminan kredit untuk Fast Track Program I dan Proyek 35 GW & Jaminan kelayakan usaha untuk program Fast Track Program II dan Proyek 35 GW
Credit guarantee for Fast Track Program I and 35 GW Projects & Guaranteed business feasibility for the Fast Track Program II and 35 GW Projects



Jalan Tol / Toll Road

Peraturan Menteri Keuangan No. 253/Tahun 2015

Pinjaman dan obligasi PT Hutama Karya untuk pembangunan tol Trans Sumatera
PT Hutama Karya's loans and bonds for the construction of the Trans Sumatra toll road



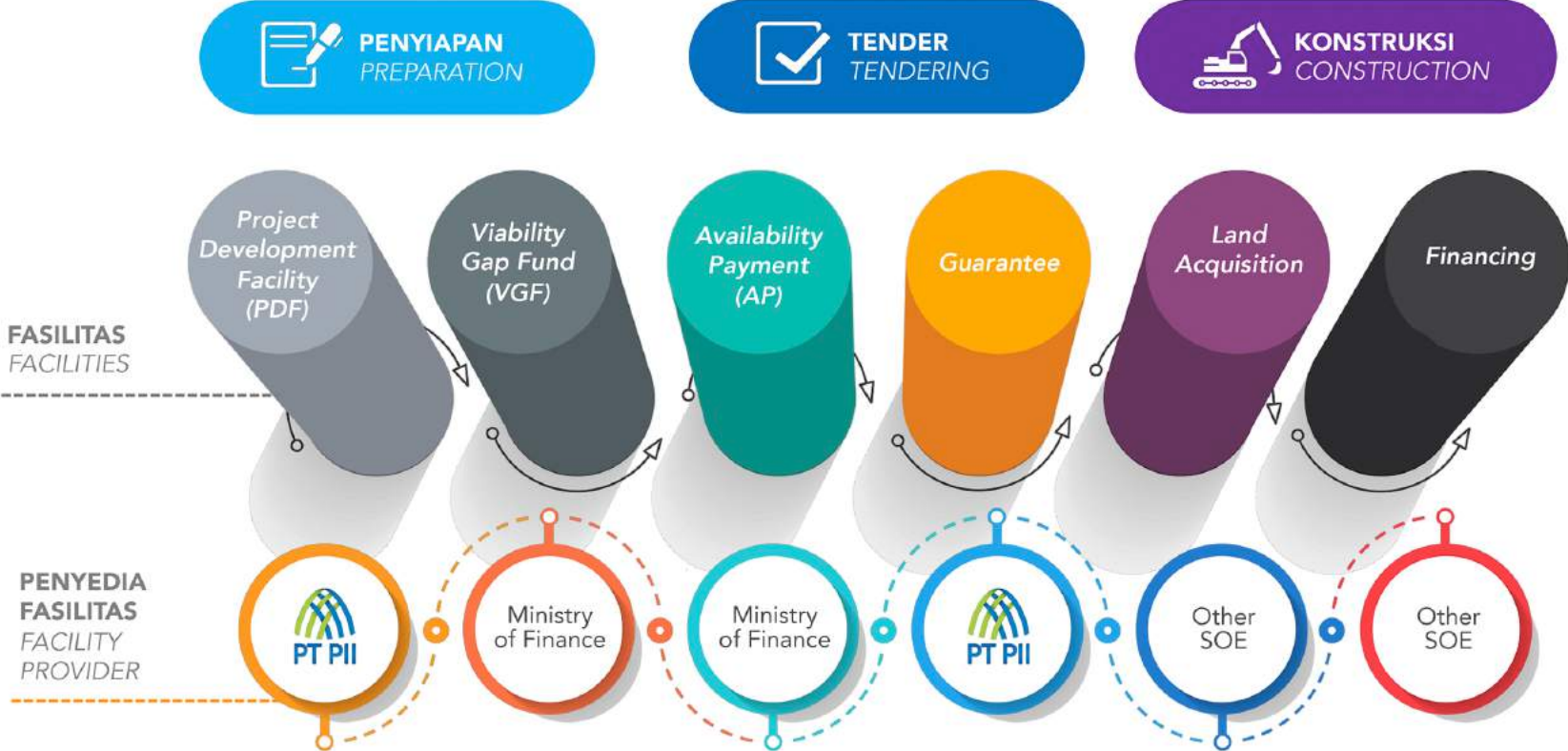
Transportasi / Transportation

Peraturan Menteri Keuangan No.148/Tahun 2017

Proyek Light Rail Transit Jabodebek
(Pinjaman dan Obligasi)
Jabodebek Light Rail Transit Project (Loans and Bonds)

MANDAT DAN PERAN PT PII DALAM PENGEMBANGAN PROYEK INFRASTRUKTUR

MANDATE & ROLE OF PT PII IN INFRASTRUCTURE PROJECT DEVELOPMENT LIFECYCLE



19

SEKTOR YANG DAPAT DIBERIKAN PENJAMINAN

SECTORS ELIGIBLE FOR GUARANTEE



Sarana & Prasarana
Facilities & Infrastructure



Transportasi
Transportation



Air Minum
Clean Water



Telekomunikasi
Telecommunication



Sumber Daya Air
Water Resources



Pengelolaan Limbah
Waste Management



Minyak & Gas Bumi
Oil and Gas



Persampahan
Waste



Perumahan
Housing



Pendidikan
Education



Pariwisata
Tourism



Olah Raga & Kesenian
Sports & Arts



Fasilitas Perkotaan
Urban Facilities



Lapas
Jail



Konservasi Energi
Energy Conservation



Ketenagalistrikan
Electricity



Kesehatan
Health



Kawasan
Region



Jalan
Road

**“ Support economic development
through PPP that provide quality
infrastructure projects ”**



PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)

Capital Place 7-8th Floor, Jl.Jenderal Gatot Subroto Kav.18

Kuningan Barat, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12710 - Indonesia

Phone : +62 21 5795 0550 | Fax : +62 21 5795 0040 | Email : info@iigf.co.id

Website : <http://www.ptpii.co.id>